

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Studi Hubungan Internasional sebagai suatu ilmu memiliki cakupan yang sangat luas termasuk di dalamnya adalah pertahanan dan keamanan militer. Di dalam dunia Internasional pertahanan dan keamanan militer merupakan cara tertentu yang digunakan oleh suatu Negara untuk melakukan kerjasama dan mencapai kepentingan nasional Negara tersebut dalam hubungannya dengan Negara lain atau dengan masyarakat Internasional.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang secara geografis sangat berdekatan dan berbatasan langsung baik darat maupun laut. Sehingga hubungan kedua negara ini sering diwarnai dengan berbagai macam dinamika. Hubungan kedua negara tak hanya karena kedekatan geografis semata akan tetapi ketimpangan-ketimpangan dalam berbagai segi kehidupan seperti masalah pertahanan dan keamanan di perairan Selat Malaka.

Selat Malaka yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Malaya Barat) dan Pulau Sumatra merupakan jalur perairan yang sempit. Kendati demikian tidak kurang dari 300 kapal dagang dari berbagai belahan dunia setiap hari mengangkut sekitar 11 juta barel minyak mentah¹. Tidak mengherankan jika

¹ Eric Watkins, "Facing the terrorist Threat in the Malacca Strait", Terrorist Monitor, Vol.II, Issue9, 6 mei 2004, hal.5 dalam Kajian : "Keamanan Pelayaran di Selat Malaka dan Implikasinya bagi Negara-Negara..."

kemudian Selat Malaka menjadi jalur perdangan dan pelayaran internasional dan berkembang menjadi urat nadi lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Selat Malaka juga dikenal sebagai rute navigasi internasional dan merupakan rute terpendek bagi kapal-kapal yang menuju Asia Timur dan dan Eropa. Sehingga Selat Malaka merupakan rute yang menarik dan diinginkan oleh kapal-kapal internasional dibandingkan rute-rute alternatif lainnya seperti Selat Sunda, Lombok dan Makassar. Hal ini menyebabkan Selat Malaka menjadi jalur yang padat dan strategis bagi pelayaran internasional.

Melihat kondisi yang ada di Selat Malaka maka selat ini menjadi sangat rawan akan terjadinya tindak kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, ilegal logging, pedatang tanpa ijin (imigran gelap), pencemaran lingkungan dan masalah pelanggaran batas wilayah. Apabila keamanan di wilayah Selat Malaka terganggu maka akan berdampak terganggunya aktivitas perdagangan lewat laut. Bukan hanya negara di Asia tenggara saja melainkan akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan negara-negara lainnya yang berkepentingan atas Selat Malaka.

Dari fenomena kejahatan diatas yang terjadi di perairan antara Indonesia dan Malaysia khususnya Selat Malaka memang menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu timbul minat penulis untuk mengkaji lebih jauh dan memilih judul penelitian sebagai berikut :

**“KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DI BIDANG MILITER
MENINGKATKAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA”**

B. Latar Belakang Masalah

Selat Malaka merupakan salah satu selat di Indonesia yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Malaysia) dan pulau Sumatra (Indonesia) yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura. Selat yang lebarnya kurang dari 24 mil memiliki arti penting karena merupakan salah satu selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional dan sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Selat ini juga merupakan jalur terpadat kedua di dunia setelah terusan Suez.²

Selat Malaka menjadi pilihan strategis bagi jalur laut perdagangan Internasional. Hal ini dibuktikan dengan setiap harinya sekitar 10 juta barel minyak mentah dan setiap tahunnya lebih dari 50 ribu kapal berlayar melalui Selat tersebut. Data ini mempertegas bukan hanya signifikansi ekonomi dari Selat Malaka, tetapi juga arti penting selat itu untuk mendukung perekonomian Indonesia dan Malaysia.³

Gambaran strategis yang membuat Selat Malaka begitu penting untuk dunia adalah karena Selat Malaka merupakan pintu masuk kapal-kapal dagang dan tanker minyak dari Timur ke Barat atau sebaliknya. Selat Malaka adalah jalur

² www.wikipedia.com

³

laut utama menuju Asia Timur, sebuah kawasan yang diyakini memiliki kemajuan ekonomi yang sangat progresif di dunia. Karena itu, banyak negara yang memiliki hasrat untuk mengendalikan secara penuh Selat Malaka atau setidaknya memiliki "*commanding power*" karena berbagai alasan, baik dari segi politik maupun ekonomi.

Selat Malaka sebenarnya bukan selat yang aman bagi jalur pelayaran Internasional. Lalu lintas Selat Malaka yang padat apalagi dilalui oleh kapal-kapal yang membawa material untuk pembangunan ekonomi merupakan target dari aksi perompakan. Perompakan yang terjadi di Selat Malaka sebagian besar terjadi di daerah perbatasan Indonesia. Hal ini disebabkan karena lemahnya sistem pengamanan di Negara Indonesia dan Malaysia dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki terutama di bidang maritim.

Tetapi sejak terjadi tragedi tsunami aksi perompakan menurun. Ada spekulasi bahwa tsunami telah menghancurkan infrastruktur perompak. Kehadiran kapal-kapal angkatan laut negara-negara asing yang membantu korban tsunami kelihatannya berfungsi menangkal aksi-aksi perompakan. Tetapi ini hanya bersifat sementara saja. Dalam kuartal pertama tahun 2005 saja telah terjadi empat kali aksi perompakan. Pada tahun 2004 saja, Asia Tenggara menyaksikan sekitar 190 aksi perompakan, yaitu 40% dari perompakan dalam skala global.⁴

Perompakan di Selat Malaka bukan satu-satunya sumber ancaman. Sejak aksi teroris terhadap gedung WTC di Amerika Serikat muncul kekhawatiran bahwa

Selat Malaka akan menjadi medan bagi kegiatan terorisme. Sejak itu isu ancaman terorisme di Selat Malaka menjadi bagian penting dari agenda pertemuan-pertemuan regional. Kalau perompakan saja dapat melakukan aksinya dengan sedemikian mudah di Selat Malaka, maka teroris tentu akan lebih mudah lagi melakukan aksinya. Yang ditakutkan adalah kemungkinan para perompak beraksi bersama terorisme dengan menggunakan awak yang diculik untuk melatih mereka menavigasi kapal-kapal dagang berukuran besar. Ada kemungkinan bahwa teroris akan menggunakan kapal-kapal sebagai senjata mereka.

Selain menyandang predikat selat terpadat kedua didunia dengan kondisi fisik geografis yang rawan dan menanggung beban pelayaran lalu lintas yang berat, masalah lain yang harus diperhatikan adalah masalah lingkungan. Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti polusi asap lintas batas (*hedge pollution*) dan kerusakan biota laut yang berada di Selat Malaka. Misalnya saja adanya kapal tanker pecah menabrak karang, kandas atau tabrakan antar kapal tanker pengangkut minyak dan menumpahkan banyak minyak ke perairan selat ini, sehingga menimbulkan pencemaran yang akan merusak kelestarian lingkungan biota yang ada di Selat Malaka.

Kegiatan ilegal yang melewati jalur Selat Malaka juga masih marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ilegal logging, ilegal minning maupun ilegal fishing. Selain di Selat Malaka, di berbagai daerah terutama daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan daerah perbatasan lainnya juga masih banyak kegiatan ilegal yang mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

Dalam hal perdagangan manusia (human trafficking) Indonesia masih termasuk negara yang tinggi intensitasnya. Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara serta masih terbatasnya kerja sama Internasional dalam bidang kejahatan transnasional dan menjadikan Indonesia sebagai ladang subur kejahatan transnasional.

Masalah keamanan lingkungan dan isu-isu sosial ekonomi menambah kompleksitas keamanan maritim di Selat Malaka. Keamanan navigasi juga menjadi salah satu isu sentral keamanan maritim di Selat Malaka, selain isu polusi laut. Kompleksitas dan ambiguitas adalah tanda-tanda dari isu keamanan lingkungan dewasa ini khususnya keamanan di wilayah maritim. Terorisme secara signifikan meningkatkan sifat ancaman non militer dan transnasional di wilayah maritim. Meskipun mungkin banyak yang berpikir bahwa ancaman terorisme di wilayah maritim, khususnya di Selat Malaka adalah skenario yang kemungkinannya sangat kecil terjadi, isu itu sendiri telah memunculkan sikap berbeda di antara Indonesia dan Malaysia di satu pihak Singapura dan Amerika

Serikat di pihak lain, utamanya mengenai langkah-langkah meningkatkan keamanan di Selat Malaka.

Karena merupakan jalur perdagangan yang strategis dan merupakan jalur keluar masuknya kapal niaga dan kapal tanker, Selat Malaka merupakan sasaran bagi para perompak dalam melakukan aksinya. Ironisnya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang paling besar dan dipandang dari sudut luas wilayah dan populasi di ASEAN, nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Armada angkatan lautnya (TNI-AL) bisa dibilang ketinggalan zaman. Banyak kapal perang yang sudah berusia tua dan tanpa peralatan perang memadai, akibat kurangnya dana perawatan dan operasional. Malaysia, yang cukup kuat perekonomiannya, hampir setali tiga uang. Kekuatan Tentara Laut Diraja Malaysia juga tidak memadai. Sementara Singapura negara kecil tetapi kaya, dengan berbagai pertimbangan tampaknya hanya memikirkan keamanan wilayah perairan lautnya sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan menaruh harapan ingin terlibat dalam menangani keamanan di perairan Selat Malaka seperti negara Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea, Thailand dan India. Kepentingan negara-negara asing yang ingin terlibat dalam menangani keamanan jalur perdagangan laut utama di dunia ini mempunyai tujuan dan kepentingan masing-masing baik di bidang ekonomi, politik maupun militer.

Keamanan perairan Selat Malaka merupakan tanggung jawab negara pantai yaitu negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kerja sama pengamanan di

wilayah ini sudah sejak lama dilakukan oleh ketiga negara pantai tersebut. Tetapi sampai saat ini dalam kerja sama tersebut belum didukung kecepatan penyampaian saling tukar informasi mengenai kejadian di Selat Malaka.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan di perairan Selat Malaka?”

D. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan fenomena keamanan yang terjadi di Selat Malaka, akan digunakan Konsep Kerjasama Internasional dan Konsep Keamanan Nasional sebagai kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini diharapkan mampu menjelaskan dan menggambarkan fenomena keamanan yang terjadi di perairan

Konsep Kerjasama Internasional

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.⁵ Konsep ini merupakan suatu alat komunikasi atau bahasa dalam kegiatan pemikiran sehingga hal ini diabstraksikan dari kesan yang ditangkap melalui indera (*sense impression*) dan digunakan untuk menyampaikan dan mentransmisikan persepsi dan informasi. Selanjutnya konsep ini merupakan kesepakatan masyarakat penggunanya.

Adapun konsep kerjasama internasional tersebut sudah dibayangkan oleh program PBB dan dicerminkan dalam berbagai perkembangan hubungan internasional modern.

“Hubungan Internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB yang relevan cenderung memajukan perdamaian dan keamanan dengan memperkuat ikatan antar negara, menciptakan hubungan antara mereka yang saling menguntungkan dan efektifitas kerjasama itu dapat dijamin dengan baik, dengan penataan kembali. Disamping itu hubungan itu akan lebih lancar apabila dilakukan tidak hanya terbatas antara pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor masyarakat”.⁶

Hubungan Internasional secara umum adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi wilayah serta penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.⁷ Hal ini dilakukan oleh suatu negara guna memenuhi kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasionalnya dapat melukiskan aspirasi suatu negara secara

⁵ Mochtar Mas' oed, " *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi* " ,LP3ES, Yogyakarta, 1990 hal. 93

⁶ Morgenthau, " *Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hubungan Antara Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional* " , New York, 1982 hal.86

⁷ Theodore A. Coulombis & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, *Pengantar Hubungan*

operasional. Dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijakan yang sangat aktual dan rencana-rencana yang menjadi tujuan suatu negara.⁸

Sedangkan menurut K.J Holsti yang mendefinisikan kerjasama Internasional adalah :

“Sebagian besar transaksi atau interaksi negara dalam sistem Internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Banyak kasus yang terjadi, sehingga pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi dan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang memuaskan semua pihak, ini yang disebut dengan kerjasama”.⁹

Proses kerjasama ini tercipta dikarenakan adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain demi kepentingan nasional kedua negara. Hal ini dikarenakan dalam hidup bermasyarakat, tidak bisa terlepas dari hubungan antara satu dengan yang lainnya, hubungan yang terjadi inilah yang bisa disebut dengan interaksi. Interaksi sendiri dapat merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antara orang-perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara kelompok manusia dengan orang-perorangan. Dalam era globalisasi frekuensi interaksi antar negara-negara menjadi bertambah tinggi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Interaksi tersebut menyebabkan terbentuknya suatu kerjasama baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan,

⁸ J.Frankel, *International Relations*, terjemahan Laila Hasyim, Ans Sungguh Bersaudara (Jakarta, 1980).

⁹ K.J. Holsti, *The State and International Relations*, Cambridge, 1963, hal. 80

kesehatan maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan yang didasari dengan perjanjian untuk mengawali terbentuknya kerjasama dengan negara lain.

Sehingga kerjasama antar negara dapat meningkatkan hubungan negara-negara di dunia internasional menjadi semakin harmonis.

Dari pengertian diatas yang berkaitan dengan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam menangani keamanan di Selat Malaka, mengingat bahwa pertahanan dan keamanan merupakan isu internasional yang mengglobal yang ada pada setiap negara. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh kedua belah pihak seperti kerjasama dalam bidang politik, militer maupun ekonomi.

Kerjasama dalam menangani kejahatan di Selat Malaka yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian antara Indonesia-Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka di Jakarta 17 Maret 1970 dan Indonesia telah meratifikasi dengan UU No 2 Th 1972 tentang batas wilayah.¹⁰ Persetujuan perbatasan landas kontinen (LK) dengan berbagai negara tetanggapun ditandatangani dan diratifikasi dengan Keppres. Persetujuan dengan Malaysia ini tentang penetapan garis batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.¹¹ Dengan mengetahui batas wilayah landas kontinental masing-masing negara, maka Selat Malaka menjadi tanggung jawab kedua negara tersebut. Oleh karena itu,

¹⁰ *Sumber: Mardiana, Sengketa Dan Perjanjian Internasional*, 28 April 2005

pemerintah Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama untuk menciptakan keamanan di wilayah tersebut.

Kerjasama ini dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia mengingat bahwa perairan Selat Malaka merupakan jalur pelayaran Internasional yang strategis baik dari segi geografis, ekonomi, politik maupun keamanan. Sehingga banyak kapal-kapal niaga maupun kapal tanker pembawa minyak dari berbagai negara melewati jalur ini untuk mempersingkat perjalanan. Karena Selat ini menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik atau jalur yang menghubungkan dari timur ke barat dan sebaliknya.

Dengan banyaknya kapal-kapal yang melewati jalur ini, keamanan di Selat Malaka menjadi sangat rawan akan terjadinya kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan adanya isu teroris.

Dalam menangani permasalahan ini pemerintah Indonesia terlibat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam bidang pertahanan militer yaitu terjalinnya kerjasama TNI Angkatan Laut dengan TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia) dengan diadakannya patroli koordinasi "Malindo" di perairan Selat Malaka dan kerja sama angkatan kedua negara dalam rangka "Elang Malindo" dan kerja sama pengamanan perbatasan darat kedua negara dalam payung General Border Committee (JBC Malindo).¹²

Dengan terbentuknya kerjasama antara TNI AL dengan TLDM Malaysia pemerintah berharap aksi-aksi kejahatan yang berada di perairan Selat Malaka

semakin menurun dan menjadikan Selat Malaka aman sebagai jalur pelayaran dan transportasi perdagangan Internasional.

Konsep Keamanan Nasional

Menurut Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Harold Brown mendefinisikan keamanan nasional (*national security*) sebagai berikut :

“kemampuan untuk menjaga keutuhan fisik dan wilayah negara; memelihara hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di dunia dengan aturan-aturan yang pantas; melindungi alam, kelembagaan dan pemerintahan dari gangguan eksternal serta mengawasi daerah perbatasan”.¹³

Keamanan Nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam menjaga dan melindungi keutuhan wilayah negaranya tanpa mengesampingkan kerjasama dengan negara-negara lain dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara yang menjalin kerjasama tersebut.

Pada dasarnya, pertahanan negara adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk memastikan tercapainya kepentingan nasional tanpa gangguan baik dari dalam maupun dari luar wilayahnya. Pandangan paham *realpolitik* dalam hubungan internasional bahkan menegaskan bahwa kepentingan nasional yang utama adalah keberlangsungan hidup bangsa (*survival of the nation*), karena tanpa itu maka kepentingan-kepentingan nasional lainnya (misalnya ekonomi, politik, ideologi dan lainnya) menjadi tidak berarti¹⁴

¹³ Brown, Harold. *Thinking About National Security Defense and Foreign Policies in a Dangerous World*. Boulder: Westview Press, 1983

¹⁴

Dalam hal ini, kerjasama antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia terus berlangsung dikarenakan adanya keterkaitan antara satu Negara dengan Negara yang lainnya. Terutama berhubungan dengan masalah keamanan wilayah perairan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan nasional bahkan mungkin internasional dimana berpengaruh dalam segi ekonomi tingkat internasional.

Keamanan perairan Selat Malaka sangat penting dan berpengaruh besar bagi kedua Negara. Karena itu diperlukan kerja sama keamanan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini perlunya penjagaan keamanan yang ketat diperairan Selat Malaka dikarenakan sebagai jalur perdagangan nasional bahkan internasional. Selat Malaka sangat riskan dengan perompakan bersenjata oleh para perompak dan para pelanggar batas wilayah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlunya kerjasama keamanan antar dua Negara, dalam hal ini kerja sama militer dalam menjaga keamanan perairan Selat Malaka sangat diperlukan.

Sebab masalah kejahatan yang terjadi di Selat Malaka termasuk kejahatan tingkat internasional atau sering disebut dengan kejahatan transnasional, sehingga keamanan perbatasan perairan Selat Malaka ini dapat berpengaruh besar pada jalur perdagangan di wilayah nasional bahkan internasional sehingga dapat menghambat peningkatan dari segi ekonomi, terutama terhadap Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Karena itu konsep Keamanan Nasional diperlukan didalam mengambil langkah-langkah kerjasama yang saling berkaitan antara Negara

... dan Negara Malaysia dimana masing-masing Negara tidak mema

dirugikan dan mendapat keuntungan dari kerjasama yang berdasarkan kepada konsep Keamanan Nasional tersebut.

E. Hipotesa.

Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan yang ada, dalam menjawab permasalahan ini penulis menarik suatu hipotesa yaitu :

Dalam menangani permasalahan kejahatan di Selat Malaka pemerintah Indonesia terlibat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam bidang pertahanan militer yaitu dengan terjalinnya kerjasama TNI AL dengan TLDM dengan diadakannya patroli koordinasi "Malindo" di perairan Selat Malaka dan kerja sama angkatan udara kedua negara dalam rangka "Elang Malindo" dan pemasangan radar visual di wilayah Selat Malaka yang diharapkan dapat menekan kejahatan yang terjadi dan melalui Selat Malaka

F. Tujuan Penulisan.

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mengkaji dan memberi gambaran objektif mengenai Pertahanan dan Keamanan Militer di suatu wilayah dan memberikan wawasan baru mengenai kajian Ilmu Hubungan Internasional yang sangat luas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan keterlibatan militer dalam menangani keamanan, dimana secara khusus

Kemudian penulisan ini juga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini lebih bersifat library reseach atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku-buku, jurnal, majalah, tabloid dan media massa seperti surat kabar serta televisi dan situs internet yang memuat data yang sesuai dengan penulisan ini.

H. Jangkauan Penelitian.

Untuk membatasi permasalahan yang ada, penulis menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2007. Namun tidak menutup kemungkinan mengambil data-data dari tahun sebelumnya yang dirasa dapat membantu dan menjelaskan penulisan ini, selama itu masih mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diangkat.

I. Kerangka Penulisan.

Penjabaran-penjabaran mengenai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, Menjelaskan Mengenai Alasan Pemilihan Judul, , Latar Belakang

Mengapa Dalam Permasalahan Kenapa Dapat Terjadi Hal tersebut

Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Kerangka Penulisan.

Bab Kedua, Menjelaskan Tentang Gambaran Umum Selat Malaka, Keadaan Fisik Selat Malaka, Arti Penting Selat Malaka dan Kepemilikan Selat Malaka.

Bab Ketiga, Berisi Tentang Masalah-masalah yang Terjadi di Selat Malaka yang Rawan akan Terjadinya Kejahatan di Selat Malaka dan Implikasinya Terhadap Keamanan Internasional.

Bab Keempat, Menjelaskan Tentang Kerjasama Antara Indonesia dan Malaysia yang Meliputi Perjanjian Batas Wilayah Selat Malaka, Pelaksanaan dan Dimulainya Kerjasama Kedua Negara, Bentuk Kerjasama Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Selat Malaka serta Meningkatkan Keamanan di Selat Malaka oleh TNI AL dan TLDM.

Bab Kelima Berisi Kesimpulan Dari Seluruh Penulisan ini